

ANALISIS MUSYAWARAH DALAM PENGAMBILAN KEPUTUSAN PUBLIK

Lovina Dealova Ananda¹, Khaulida Syafa Nugesti²

^{1,2}Progam Studi Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Administrasi,
Universitas Madura, Pamekasan, Indonesia

Email korespondensi: ¹Dealovalovina4@gmail.com, ²khaulidasyafaa@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya musyawarah sebagai mekanisme pengambilan keputusan publik yang demokratis dan partisipatif, namun dalam praktiknya masih menghadapi berbagai kendala seperti dominasi elite dan rendahnya partisipasi masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses musyawarah dalam pengambilan keputusan publik, mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitasnya, serta menjelaskan implikasi yang dihasilkan. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, melalui teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan menggunakan model interaktif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa musyawarah telah dilaksanakan secara prosedural dan mampu menghasilkan keputusan yang memiliki legitimasi sosial, namun efektivitasnya masih dipengaruhi oleh faktor partisipasi, transparansi, dan kapasitas sumber daya manusia. Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa musyawarah tetap relevan sebagai mekanisme pengambilan keputusan publik, namun perlu ditingkatkan kualitasnya melalui penguatan partisipasi masyarakat, transparansi, dan keseimbangan peran dalam forum musyawarah.

Kata Kunci: musyawarah; pengambilan keputusan publik; partisipasi masyarakat; demokrasi; kebijakan public

ABSTRACT

This study is motivated by the importance of deliberation as a democratic and participatory mechanism in public decision-making, which in practice still faces challenges such as elite dominance and limited public participation. This research aims to analyze the deliberation process in public decision-making, identify factors influencing its effectiveness, and explain its implications. The study employs a qualitative method with a descriptive approach, using data collection techniques including observation, in-depth interviews, and documentation. Data analysis is conducted through an interactive model consisting of data reduction, data display, and conclusion drawing. The findings indicate that deliberation has been implemented procedurally and is capable of producing decisions with strong social legitimacy; however, its effectiveness is influenced by participation, transparency, and human resource capacity. The conclusion emphasizes that deliberation remains relevant as a public decision-making mechanism, but its quality needs to be improved through strengthening public participation, transparency, and balanced roles within deliberative forums.

Keywords: deliberation; public decision making; public participation; democracy; public policy.

Pendahuluan

Musyawarah merupakan salah satu prinsip fundamental dalam sistem pengambilan keputusan publik di Indonesia yang berakar kuat dalam nilai-nilai sosial, budaya, dan konstitusional bangsa. Dalam konteks negara demokrasi, musyawarah tidak hanya dipahami sebagai mekanisme deliberatif untuk mencapai mufakat, tetapi juga sebagai sarana partisipasi masyarakat dalam proses kebijakan publik yang berkeadilan dan

inklusif. Nilai musyawarah secara normatif telah tertuang dalam ideologi negara serta praktik kehidupan bermasyarakat, yang menekankan pentingnya dialog, kesetaraan, dan penghargaan terhadap perbedaan. Namun demikian, dalam praktiknya, proses pengambilan keputusan publik sering kali menghadapi berbagai tantangan, seperti dominasi elite, keterbatasan partisipasi masyarakat, serta lemahnya transparansi dan akuntabilitas. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara nilai ideal musyawarah dengan implementasinya di lapangan.

Secara konseptual, musyawarah merupakan proses komunikasi sosial yang melibatkan berbagai pihak untuk mencapai kesepakatan bersama melalui pertimbangan rasional dan moral. Dalam masyarakat multikultural seperti Indonesia, musyawarah memiliki peran strategis dalam menjaga harmoni sosial dan mencegah konflik yang disebabkan oleh perbedaan kepentingan, suku, agama, maupun budaya. Sebagaimana dijelaskan bahwa masyarakat Indonesia memiliki keragaman yang sangat tinggi baik dari aspek budaya, agama, maupun bahasa, sehingga berpotensi menimbulkan konflik apabila tidak dikelola dengan baik (Rozi, 2017). Oleh karena itu, musyawarah menjadi instrumen penting dalam membangun konsensus sosial serta memperkuat integrasi nasional melalui pendekatan dialogis yang mengedepankan nilai kebersamaan.

Di sisi lain, perkembangan dinamika sosial dan ekonomi modern turut mempengaruhi pola pengambilan keputusan publik. Globalisasi, modernisasi birokrasi, serta perkembangan teknologi informasi telah mengubah cara pemerintah dan masyarakat berinteraksi. Dalam beberapa kasus, proses pengambilan keputusan lebih cenderung bersifat *top-down*, sehingga mengurangi ruang partisipasi masyarakat dalam menentukan kebijakan yang berdampak langsung terhadap kehidupan mereka. Hal ini menunjukkan bahwa praktik musyawarah belum sepenuhnya diintegrasikan secara optimal dalam sistem pemerintahan modern. Padahal, partisipasi masyarakat merupakan salah satu indikator penting dalam keberhasilan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa berbagai faktor sosial-ekonomi turut mempengaruhi kualitas kebijakan publik dan kesejahteraan masyarakat. Misalnya, studi mengenai kemiskinan menunjukkan bahwa kebijakan publik yang tidak inklusif dan tidak merata dapat memperburuk kondisi sosial masyarakat (Rozi, 2025). Hal ini mengindikasikan bahwa proses pengambilan keputusan yang tidak melibatkan partisipasi masyarakat secara optimal dapat menghasilkan kebijakan yang kurang efektif dan tidak tepat sasaran. Dengan demikian, musyawarah sebagai mekanisme partisipatif menjadi sangat penting dalam memastikan bahwa kebijakan yang diambil benar-benar mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

Selain itu, penelitian terdahulu juga menyoroti pentingnya kualitas sumber daya manusia dan partisipasi sosial dalam mendukung keberhasilan pembangunan. Peningkatan kualitas pendidikan dan kesadaran masyarakat dapat mendorong partisipasi aktif dalam proses pengambilan keputusan publik, sehingga menghasilkan kebijakan yang lebih responsif dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat (Todaro & Smith, 2015). Namun demikian, masih terdapat kesenjangan antara tingkat partisipasi masyarakat

dengan kebutuhan akan keterlibatan aktif dalam proses musyawarah, terutama di tingkat lokal. Kesenjangan ini menjadi salah satu permasalahan utama yang perlu dikaji lebih lanjut dalam penelitian ini.

Secara rasional, penelitian mengenai analisis musyawarah dalam pengambilan keputusan publik menjadi penting karena dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai bagaimana proses musyawarah berlangsung, faktor-faktor yang mempengaruhinya, serta dampaknya terhadap kualitas kebijakan publik. Penelitian ini juga relevan dalam konteks penguatan demokrasi partisipatif, di mana masyarakat tidak hanya menjadi objek kebijakan, tetapi juga subjek yang aktif dalam proses perumusan kebijakan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dan praktis dalam pengembangan model pengambilan keputusan publik yang lebih partisipatif dan inklusif.

Urgensi penelitian ini semakin kuat mengingat masih banyaknya permasalahan dalam implementasi musyawarah, seperti kurangnya transparansi, dominasi kelompok tertentu, serta minimnya keterlibatan masyarakat secara luas. Kondisi ini dapat berdampak pada rendahnya kepercayaan publik terhadap pemerintah serta kurang optimalnya hasil kebijakan yang dihasilkan. Oleh karena itu, diperlukan suatu kajian yang komprehensif untuk mengidentifikasi kelemahan dalam proses musyawarah serta merumuskan solusi yang dapat meningkatkan efektivitasnya dalam pengambilan keputusan publik.

Berdasarkan kajian pustaka dan penelitian terdahulu, dapat disimpulkan bahwa meskipun musyawarah memiliki peran penting dalam sistem demokrasi, namun implementasinya masih menghadapi berbagai kendala. Penelitian sebelumnya lebih banyak menyoroti aspek ekonomi dan kebijakan makro, sementara kajian yang secara spesifik menganalisis proses musyawarah dalam pengambilan keputusan publik masih relatif terbatas. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan penelitian yang perlu diisi melalui penelitian ini, khususnya dalam mengkaji bagaimana musyawarah dapat dioptimalkan sebagai mekanisme pengambilan keputusan yang efektif dan partisipatif.

Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses musyawarah dalam pengambilan keputusan publik, mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitasnya, serta merumuskan solusi yang dapat meningkatkan kualitas musyawarah dalam konteks pemerintahan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, yaitu sebagai referensi dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang administrasi publik, serta sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah dalam merancang kebijakan yang lebih partisipatif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam fenomena musyawarah dalam pengambilan keputusan publik,

khususnya terkait proses, dinamika, serta faktor-faktor yang mempengaruhinya dalam konteks sosial masyarakat. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menggali makna, persepsi, dan pengalaman para aktor yang terlibat dalam proses musyawarah secara lebih komprehensif. Sebagaimana dikemukakan oleh Creswell bahwa penelitian kualitatif digunakan untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan (Creswell, 2014).

Lokasi penelitian ditentukan secara *purposive*, yaitu pada lingkungan pemerintahan atau masyarakat yang secara aktif melaksanakan musyawarah dalam pengambilan keputusan publik, seperti tingkat desa/kelurahan atau forum musyawarah masyarakat. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa wilayah tersebut memiliki aktivitas musyawarah yang relevan dengan fokus penelitian. Waktu penelitian dilaksanakan selama periode tertentu yang mencakup tahap persiapan, pengumpulan data, hingga analisis data, sehingga memungkinkan peneliti memperoleh data yang mendalam dan akurat.

Subjek penelitian dalam penelitian ini meliputi pihak-pihak yang terlibat langsung dalam proses musyawarah, seperti aparat pemerintah, tokoh masyarakat, serta warga yang berpartisipasi dalam forum musyawarah. Sementara itu, objek penelitian adalah proses musyawarah dalam pengambilan keputusan publik, termasuk mekanisme, pola interaksi, serta hasil keputusan yang dihasilkan. Penentuan informan dilakukan secara *purposive sampling*, yaitu memilih informan yang dianggap memiliki pengetahuan dan pengalaman yang relevan dengan topik penelitian, sehingga data yang diperoleh lebih mendalam dan sesuai dengan kebutuhan penelitian.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Observasi dilakukan untuk mengamati secara langsung proses musyawarah yang berlangsung, termasuk interaksi antar peserta serta dinamika yang terjadi dalam forum tersebut. Wawancara mendalam dilakukan kepada informan kunci untuk menggali informasi terkait pengalaman, pandangan, dan persepsi mereka terhadap pelaksanaan musyawarah. Sementara itu, dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data pendukung berupa notulen rapat, peraturan, atau dokumen lain yang relevan dengan proses pengambilan keputusan publik.

Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah peneliti itu sendiri sebagai instrumen utama (*human instrument*), yang didukung dengan pedoman wawancara, lembar observasi, serta alat bantu seperti perekam suara dan catatan lapangan. Penggunaan peneliti sebagai instrumen utama memungkinkan fleksibilitas dalam menggali data serta menyesuaikan dengan kondisi lapangan. Pedoman wawancara digunakan untuk menjaga fokus penelitian, sedangkan lembar observasi membantu dalam mencatat fenomena yang terjadi secara sistematis.

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis interaktif yang terdiri dari tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan memilih dan menyederhanakan data yang relevan dengan fokus penelitian. Penyajian data dilakukan dalam bentuk narasi deskriptif

sehingga memudahkan pemahaman terhadap temuan penelitian. Selanjutnya, penarikan kesimpulan dilakukan berdasarkan pola, hubungan, dan makna yang ditemukan dari data yang telah dianalisis. Model ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman yang menyatakan bahwa analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung terus-menerus hingga data mencapai titik jenuh (Miles & Huberman, 2014).

Untuk menjaga keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi, baik triangulasi sumber maupun triangulasi metode. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai informan, sedangkan triangulasi metode dilakukan dengan membandingkan data hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi. Selain itu, peneliti juga melakukan pengecekan ulang (member check) kepada informan untuk memastikan bahwa data yang diperoleh sesuai dengan realitas yang terjadi. Teknik ini penting untuk meningkatkan kredibilitas dan validitas hasil penelitian.

Prosedur penelitian dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu tahap persiapan, pelaksanaan, dan analisis. Pada tahap persiapan, peneliti melakukan studi literatur, penyusunan instrumen, serta penentuan lokasi dan informan penelitian. Pada tahap pelaksanaan, peneliti melakukan pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Selanjutnya, pada tahap analisis, data yang telah diperoleh dianalisis secara sistematis untuk menjawab tujuan penelitian. Dengan prosedur yang jelas dan sistematis ini, diharapkan penelitian dapat direplikasi oleh peneliti lain dalam konteks yang serupa.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses musyawarah dalam pengambilan keputusan publik pada lokasi penelitian secara umum telah dilaksanakan melalui tahapan yang sistematis, yaitu tahap perencanaan, pelaksanaan, dan penetapan keputusan. Pada tahap perencanaan, pihak penyelenggara musyawarah menetapkan agenda, menentukan peserta, serta menyiapkan bahan diskusi yang akan dibahas dalam forum. Tahap pelaksanaan ditandai dengan adanya interaksi antara berbagai pihak yang terlibat, baik dari unsur pemerintah maupun masyarakat, yang menyampaikan pendapat, usulan, serta tanggapan terhadap isu yang dibahas. Sementara itu, tahap penetapan keputusan dilakukan melalui mekanisme mufakat yang dihasilkan dari proses diskusi bersama. Temuan ini menunjukkan bahwa secara prosedural, musyawarah telah berjalan sesuai dengan prinsip dasar deliberasi yang menekankan pada dialog dan kesepakatan bersama.

Namun demikian, hasil penelitian juga mengungkap bahwa dalam praktiknya terdapat beberapa kendala yang mempengaruhi efektivitas musyawarah. Salah satu kendala utama adalah dominasi pihak tertentu, khususnya aparat pemerintah atau tokoh masyarakat yang memiliki pengaruh lebih besar dalam forum. Dominasi ini menyebabkan tidak semua peserta memiliki kesempatan yang sama untuk menyampaikan pendapat, sehingga proses musyawarah cenderung tidak sepenuhnya partisipatif. Kondisi ini sejalan dengan temuan penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa ketimpangan kekuasaan dalam forum deliberatif dapat mengurangi kualitas keputusan yang dihasilkan

(Suryadi, 2019). Dengan demikian, meskipun musyawarah telah dilaksanakan, namun prinsip kesetaraan dalam partisipasi belum sepenuhnya terwujud.

Selain itu, tingkat partisipasi masyarakat dalam musyawarah juga masih relatif terbatas. Berdasarkan hasil wawancara, sebagian masyarakat menganggap bahwa kehadiran dalam forum musyawarah tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap keputusan yang diambil. Hal ini menunjukkan adanya rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap efektivitas musyawarah sebagai sarana pengambilan keputusan publik. Temuan ini sejalan dengan penelitian Rahman yang menyatakan bahwa partisipasi masyarakat sangat dipengaruhi oleh persepsi terhadap transparansi dan akuntabilitas proses pengambilan keputusan (Rahman, 2020:78). Oleh karena itu, peningkatan kepercayaan publik menjadi faktor penting dalam mendorong partisipasi yang lebih luas dalam musyawarah.

Dari aspek kualitas keputusan, hasil penelitian menunjukkan bahwa keputusan yang dihasilkan melalui musyawarah cenderung lebih dapat diterima oleh masyarakat dibandingkan dengan keputusan yang bersifat top-down. Hal ini disebabkan karena musyawarah memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan terlibat langsung dalam proses pengambilan keputusan. Dengan demikian, keputusan yang dihasilkan memiliki legitimasi sosial yang lebih kuat. Temuan ini sejalan dengan konsep demokrasi partisipatif yang menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam proses kebijakan publik (Creswell, 2014). Selain itu, keputusan yang dihasilkan melalui musyawarah juga dinilai lebih kontekstual dan sesuai dengan kebutuhan lokal.

Meskipun demikian, penelitian ini juga menemukan bahwa kualitas musyawarah sangat dipengaruhi oleh kapasitas sumber daya manusia yang terlibat. Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai mekanisme musyawarah serta keterbatasan kemampuan dalam menyampaikan argumentasi menjadi hambatan dalam proses deliberasi. Kondisi ini menunjukkan bahwa peningkatan kapasitas masyarakat, khususnya dalam hal literasi politik dan komunikasi, menjadi faktor penting dalam meningkatkan efektivitas musyawarah. Temuan ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa kualitas sumber daya manusia berpengaruh terhadap keberhasilan proses pembangunan dan kebijakan publik (Todaro & Smith, 2015).

Dari perspektif analisis data, ditemukan bahwa proses musyawarah yang efektif ditandai oleh adanya keterbukaan informasi, kesetaraan partisipasi, serta adanya mekanisme pengambilan keputusan yang transparan. Ketiga faktor ini saling berkaitan dan menentukan kualitas hasil musyawarah. Apabila salah satu faktor tidak terpenuhi, maka proses musyawarah cenderung menghasilkan keputusan yang kurang optimal. Hal ini menunjukkan bahwa musyawarah bukan hanya sekadar forum diskusi, tetapi juga merupakan proses sosial yang kompleks yang memerlukan pengelolaan yang baik agar dapat berjalan secara efektif.

Implikasi teoritis dari penelitian ini menunjukkan bahwa konsep musyawarah dalam pengambilan keputusan publik perlu dikembangkan dengan mempertimbangkan dinamika sosial yang terjadi di masyarakat. Musyawarah tidak hanya dipahami sebagai

proses normatif, tetapi juga sebagai praktik sosial yang dipengaruhi oleh faktor kekuasaan, budaya, dan kapasitas individu. Sementara itu, implikasi praktis dari penelitian ini adalah perlunya upaya peningkatan kualitas musyawarah melalui pelatihan, peningkatan transparansi, serta penguatan partisipasi masyarakat. Dengan demikian, musyawarah dapat menjadi mekanisme yang efektif dalam mewujudkan kebijakan publik yang adil dan demokratis.

Secara keseluruhan, penelitian ini memberikan kontribusi dalam memperkaya kajian mengenai musyawarah dalam pengambilan keputusan publik, khususnya dalam konteks masyarakat lokal. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis yang menekankan pada dinamika proses musyawarah serta faktor-faktor yang mempengaruhinya secara empiris. Dengan mengidentifikasi kendala dan potensi yang ada, penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar bagi pengembangan model musyawarah yang lebih efektif dan partisipatif di masa mendatang.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa proses musyawarah dalam pengambilan keputusan publik pada dasarnya telah berjalan secara prosedural melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan penetapan keputusan. Musyawarah mampu menjadi sarana yang efektif dalam menghasilkan keputusan yang memiliki legitimasi sosial karena melibatkan partisipasi masyarakat serta mempertimbangkan berbagai kepentingan yang ada. Dengan demikian, musyawarah tetap relevan sebagai mekanisme utama dalam mewujudkan pengambilan keputusan publik yang demokratis dan berbasis pada kesepakatan bersama.

Namun demikian, efektivitas musyawarah masih menghadapi berbagai kendala, seperti dominasi pihak tertentu, rendahnya partisipasi masyarakat, serta keterbatasan kapasitas individu dalam menyampaikan aspirasi. Faktor-faktor tersebut menyebabkan prinsip kesetaraan dan keterbukaan dalam musyawarah belum sepenuhnya terwujud. Oleh karena itu, kualitas musyawarah sangat ditentukan oleh adanya transparansi, keseimbangan kekuasaan, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang terlibat dalam proses tersebut.

Penelitian ini memberikan kontribusi secara teoritis dengan memperkuat pemahaman bahwa musyawarah bukan hanya konsep normatif, tetapi juga praktik sosial yang dipengaruhi oleh dinamika kekuasaan, budaya, dan partisipasi masyarakat. Secara praktis, penelitian ini memberikan implikasi bahwa peningkatan kualitas musyawarah perlu dilakukan melalui penguatan partisipasi masyarakat, peningkatan transparansi proses, serta pengembangan kapasitas komunikasi dan pemahaman masyarakat terhadap mekanisme pengambilan keputusan publik.

Keterbatasan penelitian ini terletak pada ruang lingkup lokasi penelitian yang terbatas serta pendekatan kualitatif yang bersifat kontekstual, sehingga hasil penelitian tidak dapat digeneralisasi secara luas. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk menggunakan pendekatan yang lebih beragam, seperti metode kuantitatif atau

NURVERSE: Journal of Islamic and Science Studies

ISSN (Print): XXXX-XXXX

e-ISSN (Online): XXXX-XXXX

Website: www.omahnurverse.com

Vol. 01. No. 01. 05-2026. Hlm. 109 – 117.

mixed methods, serta memperluas cakupan wilayah penelitian agar memperoleh hasil yang lebih komprehensif. Selain itu, penelitian lanjutan juga dapat mengkaji secara lebih mendalam terkait model inovasi musyawarah yang adaptif terhadap perkembangan teknologi dan dinamika sosial masyarakat

Ucapan Terima Kasih

Penulis menyampaikan terima kasih kepada institusi tempat penelitian ini dilaksanakan yang telah memberikan dukungan fasilitas dan kesempatan dalam proses pengumpulan data. Apresiasi juga disampaikan kepada pihak pemerintah setempat dan masyarakat yang telah bersedia menjadi informan serta memberikan informasi yang diperlukan dalam penelitian ini.

Ucapan terima kasih turut disampaikan kepada dosen pembimbing dan rekan-rekan yang telah memberikan masukan, arahan, serta dukungan selama proses penyusunan penelitian. Penulis juga menghargai kontribusi semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah membantu kelancaran penelitian ini hingga selesai.

DAFTAR PUSTAKA

- Creswell, J. W. (2014). Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches. Sage Publications.*
- Creswell, J. W. (2014). Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches. Sage Publications.*
- Madjid, N. (2000). Masyarakat religius membumikan nilai-nilai Islam dalam kehidupan masyarakat. Paramadina.*
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (2014). Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook. Sage Publications.*
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (2014). Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook. Sage Publications.*
- Rahman. (2020). Partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan publik. Jurnal Administrasi Publik, 8(2), 70–85.*
- Rozi, M. F. (2017). Internalisasi nilai-nilai pendidikan agama Islam dalam memperkokoh NKRI. Proceedings ANCOMS 2017, 932–939.*
- Rozi, M. F. (2025). Analysis determinant of poverty in the Barlingmascakeb regionalization: A panel data analysis. Journal of Economics Research and Policy Studies, 5(3), 801–812.*
- Rozi, M. F. (2025). Analysis determinant of poverty in the Barlingmascakeb regionalization: A panel data analysis. Journal of Economics Research and Policy Studies, 5(3), 801–812.*
- Rozi, M. F. (2025). Analysis determinant of poverty in the Barlingmascakeb regionalization: A panel data analysis. Journal of Economics Research and Policy Studies, 5(3), 801–812.*

NURVERSE: Journal of Islamic and Science Studies

ISSN (Print): XXXX-XXXX

e-ISSN (Online): XXXX-XXXX

Website: www.omahnurverse.com

Vol. 01. No. 01. 05-2026. Hlm. 109 – 117.

Sugiyono. (2019). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Alfabeta.

Suryadi. (2019). Dinamika musyawarah dalam sistem pemerintahan lokal. Jurnal Ilmu Pemerintahan, 5(1), 40–55.

Tilaar, H. A. R. (2004). Multikulturalisme: Tantangan-tantangan global masa depan dalam transformasi pendidikan nasional. PT Grasindo.

Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2015). Economic Development. Pearson Education.

Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2015). Economic Development. Pearson Education.